



PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tanuwijaya Nomor 7 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Fax. (0265) 336438
E-mail : kesbang@tasikmalayakab.go.id Website : kesbang.tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

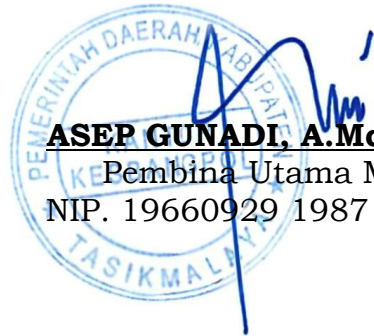
Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang dengan kudrot-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 memuat kebijakan pembangunan yang diaplikasikan ke dalam program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Mengacu pada hasil kegiatan dan program kerja tahun 2024, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya menetapkan program kerja tahun 2025 sehingga memiliki sinergitas yang berkesinambungan dan diharapkan menjadi bahan penunjang serta pendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, sebagai kontribusi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini menjadi upaya nyata guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dengan penetapan sasaran-sasaran strategis dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dengan mengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungannya, sumbang saran serta kritik yang membangun sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Tasikmalaya, 23 Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya



ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660929 198710 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	13
1.3 Maksud dan Tujuan	20
1.4 Sistematika Penulisan	21
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	61
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	78
2.5 Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	83
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	103
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	104
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	106
3.2 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	108
3.3 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025.....	109
BAB IV PENUTUP.....	126
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 7

Tabel 1.2 Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 11

Tabel 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesabangpol TA 2025 23

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025..... 24

Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 36

Tabel 2.4 Kesesuaian Renja Bakesbangpol Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025..... 62

Tabel 2.5 Kerangka Keterkaitan Isu Strategis 79

Tabel 2.6 Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..... 83

Tabel 3.1 Sasaran Dan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 104

Tabel 3.2 IKU Bakesbangpol Tahun 2025 107

Tabel 3.3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 110

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Hubungan Perubahan Renja SKPD Kabupaten
Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Tahun 2025 13

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai unsur pendukung dalam menjaga stabilitas nasional di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam memelihara ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui fungsi-fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 pada dasarnya telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Namun, dalam perjalanannya, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap dokumen Renja tersebut agar tetap selaras dengan dinamika pembangunan, kondisi aktual di lapangan, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sampai dengan triwulan pertama tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini dilatarbelakangi oleh perlunya penyesuaian terhadap hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, realokasi atau refocusing anggaran, serta kebutuhan strategis lainnya yang muncul selama proses

pelaksanaan. Perubahan Renja juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor tujuan pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara sistematis melalui pengkajian terhadap kondisi riil kelembagaan, capaian indikator kinerja, serta konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya hingga Triwulan I Tahun 2025, menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan perencanaan. Selain itu, pelaksanaan review terhadap capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya juga menjadi acuan utama dalam menentukan fokus perbaikan dan penajaman program kegiatan pada sisa tahun anggaran.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja ini, diharapkan dapat memberikan arah pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan aktual, serta memperkuat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh.

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, selaras dengan Renstra Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja Perubahan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Renja Perubahan SKPD dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Renja ini disusun untuk menjaga kesinambungan dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa

sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “*Ka cai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak*” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotongroyong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta’awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta’awun) dalam al-Qur’an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلم) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيْم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلام) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran,

		kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas

		pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau

		teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
--	--	--

Sumber: RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 1.2
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Religius/Islami	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik
2	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.

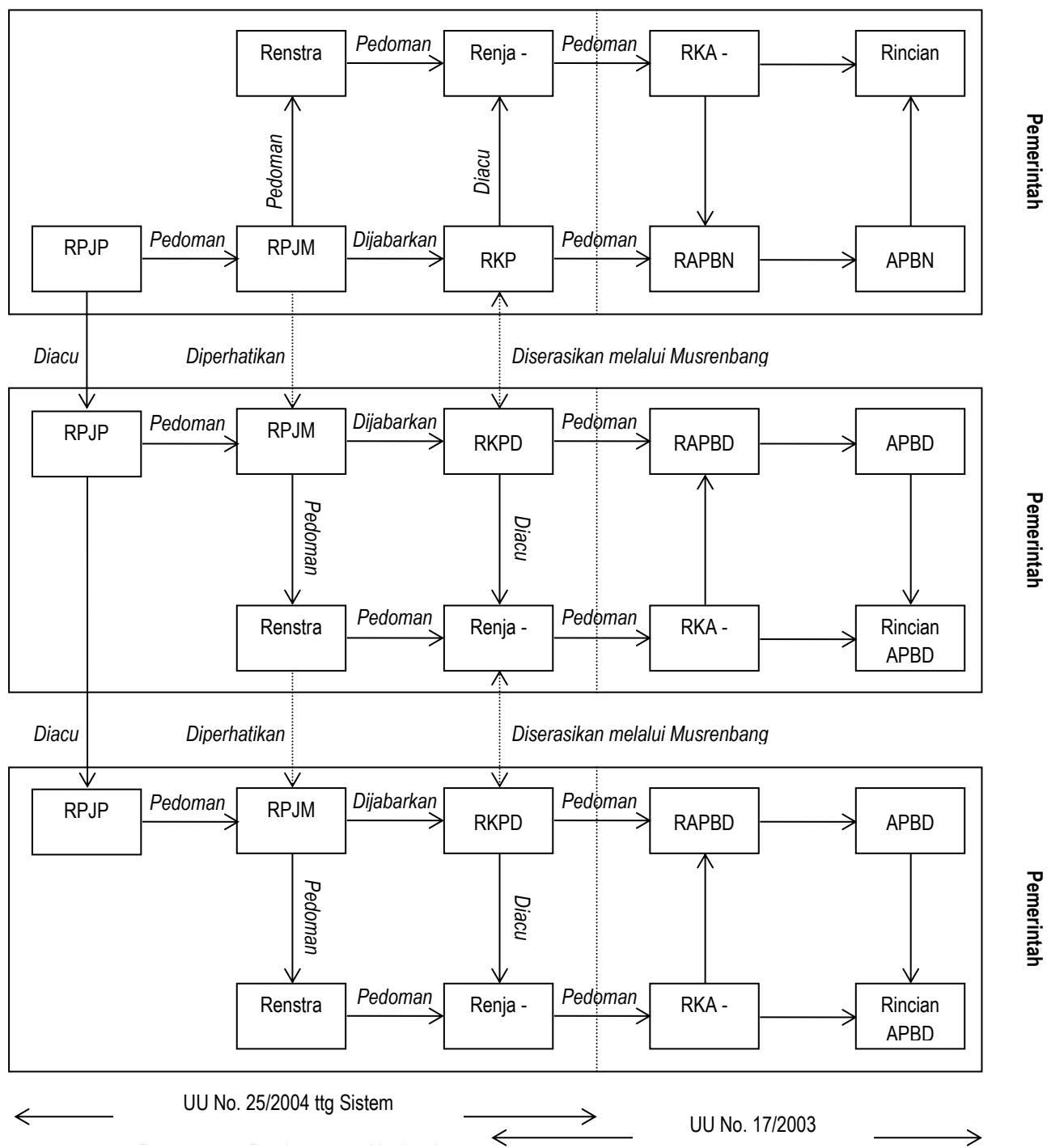
		pertanian dan pariwisata;	
3	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026

HUBUNGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam menyusun Renja Perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra diajukan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Hubungan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2025



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
 13. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

- Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Nomor 388 Tahun 2023);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4)
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12)

50. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
51. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
52. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
53. Surat Edaran nomor : 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
54. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Merumuskan perubahan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit, hal ini dapat terlihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian apa yang dilaporkan dan dihasilkan, penilaian atas pencapaian hasil, penilaian atas aktivitas, program, kebijaksanaan dan keselarasan tujuan dan sasaran dengan visi misi organisasi, penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, penilaian pelaksanaan tugas, penilaian kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berorientasi pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yang menjadikan landasan perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun menjadi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sehingga dapat terukur keberhasilannya. Pengukuran kinerja atas kebijakan dan program serta kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dan pengukuran kinerja.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, telah ditetapkan rencana kinerja ke dalam 6 (enam program), 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 79.826.173.142. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi keuangan baru mencapai 0,92%. Jika dilihat dari persentase penyerapan anggaran, kinerja Bakesbangpol

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sampai triwulan I masih sangat rendah, jauh di bawah 25%, hal ini terutama dikarenakan belum terrealisasinya belanja hibah yang merupakan persentase anggaran terbesar pada dokumen pelaksanaan anggaran Bakesbangpol Tahun Anggaran 2025. Postur anggaran Bakesbangpol Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Kesabangpol TA 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 40.087.069.113,00	Rp. 79.743.257.842,00	Rp. 39.656.188.729,00	49.73
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 4.246.243.233,00	Rp. 4.246.243.233,00	Rp. 0,00	0.00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.723.705.880,00	Rp. 9.109.580.880,00	Rp. 385.875.000,00	4.24
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 27.117.120.000,00	Rp. 66.387.433.729,00	Rp. 39.270.313.729,00	59.15
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 83.849.300,00	Rp. 82.915.300,00	(Rp. 934.000,00)	(1.13)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 83.849.300,00	Rp. 82.915.300,00	(Rp. 934.000,00)	(1.13)

Realsiasi kinerja Bakesbangpol Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan I
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN	%	FISIK
				Rp.		(%)
1	2		3	4	5	6
A	PENDAPATAN		0	0	0	0
B	BELANJA		79.826.173.142	732.456.724	0,92%	0,92%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.151.498.413	417.856.724	8,11%	8,11%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70.000.000	-	0,00%	0,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	-	0,00%	0,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.246.243.233	417.856.724	9,84%	9,84%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.246.243.233	417.856.724	9,84%	9,84%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		373.533.200	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.900.000	-	0,00%	0,00%

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.500.000	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.133.200	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	-	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000	-	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.000.000	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.721.980	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.021.980	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.700.000	-	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.000.000	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000	-	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	-	0,00%	0,00%
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		3.180.000.000	-	0,00%	0,00%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.180.000.000	-	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.660.000.000	-	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.470.000.000	-	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000	-	0,00%	0,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	46.013.833.729	-	0,00%	0,00%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	46.013.833.729	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	175.000.000	-	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.675.120.000	-	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	40.163.713.729	-	0,00%	0,00%

		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		10.577.350.000	-	0,00%	0,00%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		10.577.350.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.513.600.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	63.750.000	-	0,00%	0,00%
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1.348.900.000	-	0,00%	0,00%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.348.900.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	790.000.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	527.500.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31.400.000	-	0,00%	0,00%
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		13.554.591.000	314.600.000	2,32%	2,32%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		13.554.591.000	314.600.000	2,32%	2,32%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.004.901.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.715.000.000	314.600.000	2,94%	2,94%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	71.400.000	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	763.290.000	-	0,00%	0,00%
		Jumlah	79.826.173.142	732.456.724	0,92%	0,92%

PROGRAM I: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pagu anggaran program sebesar Rp 5.151.498.413, sudah terealisasi sebesar Rp 417.856.724 atau 8,11%, dengan kategori kinerja cukup karena berada pada kisaran <10%.

KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 70.000.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk karena berada di bawah 10%.

- Sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk karena berada di bawah 10%. Hal ini disebabkan proses penyusunan dokumen masih berjalan dan belum memasuki tahap pembiayaan.

- Sub kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk karena berada di bawah 10%. Realisasi direncanakan setelah pelaksanaan rapat evaluasi pada triwulan II.

KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 4.246.243.233, sudah terealisasi sebesar Rp 417.856.724 atau 9,84%, dengan kategori kinerja cukup karena berada pada kisaran <10%.

- Sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran sebesar Rp 4.246.243.233, sudah terealisasi sebesar Rp 417.856.724 atau 9,84%, dengan kategori kinerja cukup karena berada pada kisaran <10%. Penyerapan belum penuh karena pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan lainnya masih menunggu triwulan selanjutnya.

KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 373.533.200, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk karena berada di bawah 10%.

- Sub kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp 106.900.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Penyebabnya adalah pengadaan ATK dan perlengkapan kantor belum dimulai karena menunggu proses pengadaan.
- Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp 69.500.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Proses pengadaan masih dalam tahap perencanaan pengadaan barang.
- Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu anggaran sebesar Rp 71.133.200, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Dokumen cetak masih dalam tahap desain dan belum dicetak.
- Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu anggaran sebesar Rp 27.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Rencana pengadaan akan dilakukan secara kolektif bersama sub kegiatan lainnya.
- Sub kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu anggaran sebesar Rp 26.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan kunjungan belum dilakukan pada triwulan I.
- Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu anggaran sebesar Rp 73.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan rapat dijadwalkan akan dilaksanakan mulai triwulan II.

KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 216.721.980, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

- Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran sebesar Rp 33.021.980, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Pembayaran rekening

listrik dan air masih menunggu tagihan dan kontrak berjalan efektif.

- Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp 183.700.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Pembayaran jasa kebersihan dan keamanan baru dilakukan pada akhir triwulan.

KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 245.000.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

- Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu anggaran sebesar Rp 180.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Pembayaran pajak kendaraan direncanakan pada masa jatuh tempo di triwulan II dan III.

- Sub kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Proses pemeliharaan akan dilakukan menunggu hasil pengadaan jasa konstruksi ringan.

- Sub kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan direncanakan semester II.

PROGRAM II: PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Pagu anggaran program sebesar Rp 3.180.000.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk karena berada di bawah 10%.

KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 3.180.000.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pagu anggaran sebesar Rp 1.660.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan ini belum dilaksanakan karena sebagian besar kegiatan masih dalam tahap penjadwalan teknis pelaksanaan di triwulan II.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pagu anggaran sebesar Rp 1.470.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Penjadwalan kegiatan baru akan dilakukan setelah sinkronisasi dengan instansi vertikal dan mitra pelaksana.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Monitoring akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan inti.

PROGRAM III: PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pagu anggaran program sebesar Rp 46.013.833.729, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 46.013.833.729, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

- Sub kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan
Pagu anggaran sebesar Rp 175.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan masih dalam tahap pengumpulan data dan konsultasi kebijakan.
- Sub kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan
Pagu anggaran sebesar Rp 5.675.120.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Proses pelaksanaan menunggu petunjuk teknis dan finalisasi kebijakan pusat.
- Sub kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi
Pagu anggaran sebesar Rp 40.163.713.729, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Sub kegiatan ini merupakan belanja hibah untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Realisasi menunggu finalisasi administrasi hibah.

PROGRAM IV: PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pagu anggaran program sebesar Rp 10.577.350.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 10.577.350.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp 10.513.600.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Sub kegiatan ini merupakan belanja hibah yang sedang dievaluasi berkaitan dengan kebijakan efisiensi/rasionalisasi anggaran.
- Sub kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pagu anggaran sebesar Rp 63.750.000, belum terealisasi atau

0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Monitoring akan dilakukan setelah pemberian hibah dan pelaksanaan program berjalan.

PROGRAM V: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pagu anggaran program sebesar Rp 1.348.900.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 1.348.900.000, belum terdapat realisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan

Pagu anggaran sebesar Rp 790.000.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan belum dilaksanakan karena masih dalam proses penyusunan teknis pelaksanaan.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi

Pagu anggaran sebesar Rp 527.500.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Koordinasi dengan mitra kerja lintas sektor baru akan dilaksanakan pada triwulan II.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pagu anggaran sebesar Rp 31.400.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Monitoring akan dilakukan setelah kegiatan utama selesai dilaksanakan.

PROGRAM VI: PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pagu anggaran program sebesar Rp 13.554.591.000, sudah terealisasi sebesar Rp 314.600.000 atau 2,32%, dengan kategori kinerja cukup karena berada pada kisaran <10%.

KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 13.554.591.000, sudah terealisasi sebesar Rp 314.600.000 atau 2,32%, dengan kategori kinerja cukup.

- Sub kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan
Pagu anggaran sebesar Rp 2.004.901.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan belum berjalan karena masih dalam tahap pemetaan risiko wilayah.
- Sub kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi
Pagu anggaran sebesar Rp 10.715.000.000, sudah terealisasi sebesar Rp 314.600.000 atau 2,94%, dengan kategori kinerja cukup. Kegiatan koordinasi telah dilakukan dalam rangka deteksi dini dan kesiapsiagaan terhadap potensi konflik sosial.
- Sub kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pagu anggaran sebesar Rp 71.400.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Monitoring akan menyusul setelah pelaksanaan intervensi lapangan.
- Sub kegiatan: Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Pagu anggaran sebesar Rp 763.290.000, belum terealisasi atau 0,00%, dengan kategori kinerja buruk. Kegiatan Forkopimda direncanakan pada pertengahan tahun setelah agenda pemerintah pusat tersinkronisasi.

Total realisasi seluruh program sampai Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 732.456.724 dari total pagu Rp 79.826.173.142 atau sebesar 0,92%, yang dikategorikan berkinerja buruk secara umum karena jauh di bawah target ideal 25%.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 disusun dan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara khusus, sebagai wujud konkret atas pelaksanaan urusan kesatuan banga dan politik. Dana yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil Renja Bakesbangpo Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I ditunjukkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target 2025
Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
Nilai SAKIP	BB
Nilai IKM	84

No	Ko de	Sasaran (RPJMD/Rens tra)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Kumulatif 2021- 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi n-1		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
				Indikator	Satu an	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(9+10+11)/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%	
		(Sasaran RPJMD) Menurunnya potensi dan kejadian konflik di																									

		Kabupaten Tasikmalaya																								
I		(Sasaran Renstra) Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	78	25.057.124.049	67,15	6.924.182.484,00	75	4.153.602.170	67,15	910.687.406						67,15	910.687.406	90%	21,93%	67,15	7.834.869.890	86,09%	31,27%
				Nilai IKM	Poin	83	7.935.000.000	83,30	3.470.585.122,00	85,10	1.437.175.630	83,30	98.017.597						83,30	98.017.597	98%	6,82%	83,30	3.568.602.719	100,36%	44,97%
I.1			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	150	450.000.000	41	149.683.000,00	26	133.350.000	8	45.370.000						8	45.370.000	30,77%	34,02%	49	195.053.000	32,67%	43,35%
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	28	250.000.000	10	104.878.000,00	4	106.950.000	8	45.370.000						8	45.370.000	200,00%	42,42%	18	150.248.000	64,29%	60,10%
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	60.000.000	-	-	-	-	-	-						-	-			-	-	0,00%	0,00%
4			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	110	140.000.000	44	44.805.000,00	22	26.400.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	44	44.805.000	40,00%	32,00%

I.4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi Umum	Perse n	50 0	2.085.000.000	231,11	1.167.042.900,00	100,00	422.447.600	25	41.758.500						25	41.758.500	25,00%	9,88%	256	1.208.801.400	51,22%	57,98%
1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	250.000.000	32	251.684.500,00	12	87.174.400	3	12.486.000						3	12.486.000	25,00%	14,32%	35	264.170.500	58,33%	105,67%
2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	275.000.000	32	128.859.100,00	12	56.133.200	3	11.942.500						3	11.942.500	25,00%	21,28%	35	140.801.600	58,33%	51,20%
3			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Doku men	60	150.000.000	32	60.000.000,00	12	27.000.000	3	4.500.000						3	4.500.000	25,00%	16,67%	35	64.500.000	58,33%	43,00%
4			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	60	130.000.000	32	92.025.000,00	12	26.000.000	3	2.750.000						3	2.750.000	25,00%	10,58%	35	94.775.000	58,33%	72,90%
5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	60	900.000.000	32	457.894.300,00	12	150.000.000	3							3	-	25,00%	0,00%	35	457.894.300	58,33%	50,88%
6			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	380.000.000	32	176.580.000,00	12	76.140.000	3	10.080.000						3	10.080.000	25,00%	13,24%	35	186.660.000	58,33%	49,12%

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men		12	50.000.000,00										-	-	0,00%	0,00%	12	50.000.000	0,00%	0,00%
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		25,00%	12,68%			58,33 %	62,13%
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi	Tinggi			Renda h	Rendah
1.5			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Perse n	30 0	2.350.000. 000	-	-	11	176.776.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	500.000.00 0											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	350.000.00 0			3	88.388.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	1.500.000. 000			8	88.388.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%

																		Predikat kinerja Kegiatan			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Renda h	Sangat Rendah
I.6			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n	50 0	1.000.000. 000	400%	268.975.328,0 0	24	236.021.980	6	20.759.097						6	20.759.09 7	25,00%	8,80%	10	289.734.425	2,00%	28,97%
1			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	60	225.000.00 0	24	48.625.328,00	12	33.021.980	3	4.859.097						3	4.859.097	25,00%	14,71%	27	53.484.425	45,00 %	23,77%
2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	60	775.000.00 0	24	220.350.000,0 0	12	203.000.000	3	15.900.000						3	15.900.00 0	25,00%	7,83%	27	236.250.000	45,00 %	30,48%
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)			25,00%	11,27%			45,00 %	27,13%
																		Predikat kinerja Kegiatan			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Renda h	Sangat Rendah
I.7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n	50 0	1.750.000. 000	400%	956.621.900,0 0	100	455.330.000	1	35.500.000						1	35.500.00 0	1,00%	7,80%	5	992.121.900	1,00%	56,69%

1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	150.000.000	15	309.799.900,00	20	250.000.000	1	35.500.000						1	35.500.000	5,00%	14,20%	16	345.299.900	133,33%	230,20%
2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	950.000.000	20	293.160.000,00										-	-	0,00%	0,00%	20	293.160.000	16,67%	30,86%
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	225.000.000	10	20.450.000,00										-	-	0,00%	0,00%	10	20.450.000	33,33%	9,09%
4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	425.000.000	12	333.212.000,00	1	190.000.000								-	-	0,00%	0,00%	12	333.212.000	240,00%	78,40%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			10	65.000.000,00	10	15.330.000								-	-	0,00%	0,00%	10	65.000.000	0,00%	0,00%
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		5,00%	14,20%			105,83%	87,14%
																			Predikat kinerja Program		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi

																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)			30,00%	13,48%			65,93 %	43,62%
																		Predikat kinerja Program			Sangat Tinggi	Rendah			Sedan g	Sangat Rendah
II		Menurunnya Potensi dan Kejadian Konflik di Kabupaten Tasikmalaya	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kaulitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perse n	50 0 %	67.555.000 .000	400%	24.551.585.10 0,0	100 %	18.180.667.800	23,52 %	3.187.615.0 00						23,52 %	3.187.615 .000	23,52%	17,53%	423,52 %	27.739.200.10 0	84,70 %	41,06%
II.1			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen/Lapo ran	Doku men	11 6	4.555.000. 000	32	1.299.509.000 ,0	24	899.999.800	6	36.200.000						6	36.200.00 0	25,00%	4,02%	38	1.335.709.000	32,76 %	29,32%
				Jumlah orang	Oran g	18 .8 00	63.000.000 .000	11.575	23.252.076.10 0,0	4.80 0	17.280.668.000	1715	3.151.415.0 00						1715	3.151.415 .000	35,73%	18,24%	13.290	26.403.491.10 0	70,69 %	41,91%

1			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Doku men	64	400.000.00 0	-	-									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Doku men	8	500.000.00 0	-	-									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Oran g	15 .0 00	7.000.000. 000	2.250	1.478.319.800 ,0	3.50 0	700.000.000	1500	398.525.000					1.500	398.525.0 00	42,86%	56,93%	3.750	1.876.844.800	25,00 %	26,81%
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Oran g	3. 80 0	56.000.000 .000	9.850	23.531.596.30 0,0	1.30 0	16.580.668.000	215	2.752.890.0 00					215	2.752.890 .000	16,54%	16,60%	10.065	26.284.486.30 0	264,87 %	46,94%

																		Predikat kinerja Program			Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
II.2			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	Perse n	50 0 %	71.509.953 .000	400%	96.545.175.79 0,00	100 %	69.192.883.867	12,86 %	5.918.250.0 00						0,13	5.918.250 .000	12,86%	12,86%	412,86 %	102.463.425.7 90	82,57 %	143,29 %
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen	Doku men	40	6.570.000. 000	23	1.000.540.050 ,00	4	1.722.854.900	1	83.960.000						1,00	83.960.00 0	25,00%	25,00%	24	1.084.500.050	60,00 %	16,51%
				Jumlah orang	Oran g	72 .0 00	64.939.953 .000	30.325	95.544.635.74 0,00	52.9 00	67.470.028.967	3200	5.834.290.0 00						3200	5.834.290 .000	6,05 %	6,05%	33.525	101.378.925.7 40	46,56 %	156,11 %

1			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	6	450.000.000	-	-	2	574.554.900							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	8	4.800.000.000	4	621.600.000,00	2	1.148.300.000	1	83.960.000					1	83.960.000	50,00%	7,31%	5	705.560.000	62,50%	14,70%

			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	10.700	12.439.953.000	2.000	10.338.588.329,00	2.900	5.675.120.000	2900	5.675.120.000					2.900	5.675.120.000	100,00%	100,00%	4.900	16.013.708.329	45,79%	128,73%
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	61.300	52.500.000.000	28.000	87.114.563.009,00	50.000	61.794.908.967	300	159.170.000					300	159.170.000	0,60%	0,26%	28.300	87.273.733.009	46,17%	166,24%

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	26	1.320.000.000	24	1.074.236.403,00										-	-		24	1.074.236.403	92,31 %	81,38%	
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	37,65%	35,86%				61,69 %	97,76%
																			Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Rendah	Tinggi
																			Rata-rata capaian kinerja Program (%)	37,65%	35,86%				61,69 %	97,76%
																			Predikat kinerja Program	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Rendah	Sangat Tinggi
II.3			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	Person	500 %	34.610.350.000	400%	29.560.998.469,00	100 %	18.732.000.000	0,06%	6.800.000						0,00	6.800.000	0,06%	0,04%	4,00	29.567.798.469	80,01 %	85,43%

1			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen/laporan	Dokumen	68	3.095.850.000	22	379.998.496,00	12	200.000.000	3	6.800.000						3	6.800.000	25,00%	3,40%	25	386.798.496	36,76%	12,49%
				Jumlah orang	Orang	3.100	31.514.500.000	300	29.181.000.000,00	5.000	18.532.000.000	0	-							-	0,00%	0,00%				
			Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	32	500.000.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	1.020.000.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.300	30.510.000.000	495	29.181.000.000,00	3.000	17.532.000.000								-	-	0,00%	0,00%	495	29.181.000.000	38,08%	95,64%
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.800	1.004.500.000	-	-	2.000	1.000.000.000								-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	26	1.575.850.000	21	379.998.469,00	12	200.000.000	3	6.800.000						3	6.800.000	25,00%	3,40%	24	386.798.469	92,31%	24,55%
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		12,50%	1,70%			65,19%	60,09%
																			Predikat kinerja Kegiatan		Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah
																			Rata-rata capaian kinerja Program (%)		12,50%	1,70%			65,19%	60,09%
																			Predikat kinerja Program		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah
III			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Person	500%	105.825.000.000	400%	3.148.860.000,0	100%	5.378.400.000	12,31%	166.062.000						12,31%	166.062.000	12,31%	3,09%	0,12	1.066.062.000	2,46%	1,01%
III.1			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/laporan	Dokumen	34	2.225.000.000	21	113.750.000,0	2	5.000.000	3	7.700.000						3,00	7.700.000	150,00%	154,00%	24	121.450.000	70,59%	5,46%

				Jumlah orang	Oran g	6. 93 6	103.600.00 0.000	1.700	3.035.110.000 ,0	11.9 00	5.373.400.000	300	158.362.000						300	158.362.0 00	2,52%	2,95%	2.000	3.193.472.000		
1			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Doku men	10	475.000.00 0	-	-	2	5.000.000								-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Doku men	8	800.000.00 0	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.236	100.750.000.000	3.700	1.846.605.000,0	11.500	5.173.400.000	0	1.612.000					-	1.612.000	0,00%	0,03%	3.700	1.848.217.000	299,35%	1,83%
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	5.700	2.850.000.000	2.400	1.188.505.000,0	400	200.000.000	300	156.750.000					300	156.750.000	75,00%	78,38%	2.700	1.345.255.000	47,37%	47,20%

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	24	950.000.000	24	113.750.000,0		3	7.700.000						3	7.700.000			27	121.450.000	112,50 %	12,78%
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		37,50%	39,20%			153,07 %	20,61%
																		Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)		37,50%	39,20%			153,07 %	20,61%
																		Predikat kinerja Program		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
III. 2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perse n	500 %	11.820.000.000	400%	3.634.424.150,00	100 %	2.350.000.000	12,42 %	395.062.600					0,12	395.062.600	12,42%	16,81%	0	2.256.631.800	2,48%	19,09%
1			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Jumlah dokumen/laporan	Dokumen	16	1.470.000.000	21	110.800.000,00	14	200.000.000	3	17.000.000					3,00	17.000.000	21,43%	8,50%	24	127.800.000	150,00 %	8,69%

			Karakter Kebangsaan																								
				Jumlah orang	Oran g		9.300.000. 000	6.980	3.523.624.150 ,00	430 0	2.150.000.000	700	378.062.600							700	378.062.6 00	16,28%	17,58%	7.680	3.901.686.750	0,00%	41,95%
				Jumlah Keluarga	Kelu arga		1.050.000. 000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Doku men	64	400.000.00 0	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan/Perumusa n Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Doku men	8	400.000.00 0	-	-	2	100.000.000									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	9.600	4.800.000.000	4.070	2.034.744.950,00	2.100	1.050.000.000							-	-	0,00%	0,00%	4.070	2.034.744.950	42,40%	42,39%
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6.600	4.500.000.000	6.400	3.230.109.200,00	2.200	1.100.000.000	700	378.062.600					700	378.062.600	31,82%	34,37%	7.100	3.608.171.800	107,58%	80,18%
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Laporan	30	670.000.000	24	131.000.000,00	12	100.000.000	3	17.000.000					3	17.000.000	25,00%	17,00%	27	148.000.000	90,00%	22,09%

Rata-rata capaian kinerja Subkegiatan (%)	28%	17%			88%
Predikat kinerja Subkegiatan	Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sudah menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 2.2.1 Kesesuaian Program antara Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Bakesbangpol dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam Renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program.
- 2.2.2 Kesesuaian Kegiatan antara Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025. Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Bakesbangpol, ada beberapa kegiatan yang tidak diakomodir pada APBD tahun 2025 sehingga tingkat kesesuaian kegiatan pada Renja dengan kegiatan pada APBD hanya 80,56% yaitu jumlah kegiatan yang ada dalam Renja Bappelitbangda sebanyak 36 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD yaitu sebanyak 29 kegiatan.
- 2.2.3 Kesesuaian Sub Kegiatan antara Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.

Tabel 2.4.
Kesesuaian Renja Bakesbangpol Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja 2025	APBD 2025
1	2					3	4	5	6	7
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			119.425.945.467,00	79.826.173.142
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			119.325.945.467,00	79.826.173.142
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			119.325.945.467,00	79.826.173.142
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.591.993.800,00	5.151.498.413
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	133.350.000,00	70.000.000
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	106.950.000,00	50.000.000
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	26.400.000,00	20.000.000
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.020.252.170,00	4.246.243.233

	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.020.252.170,00	4.246.243.233
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	146.600.050,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	46.600.050,00	
		8	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100.000.000,00	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	422.447.600,00	373.533.200
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.174.400,00	106.900.000
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	76.140.000,00	69.500.000
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56.133.200,00	71.133.200
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000

	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.000.000,00	26.000.000
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	73.000.000
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	177.992.000,00	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	89.604.000,00	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	88.388.000,00	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	236.021.980,00	216.721.980
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.021.980,00	33.021.980
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.000.000,00	183.700.000

	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	455.330.000,00	245.000.000
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	250.000.000,00	180.000.000
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	50.000.000
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15.330.000,00	15.000.000
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	2.350.000.000,00	3.180.000.000
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	2.350.000.000,00	3.180.000.000

	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2100 Orang	1.050.000.000,00	1.660.000.000
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2200 Orang	1.100.000.000,00	1.470.000.000

	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	100.000.000,00	50.000.000
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	0,00	
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0 Orang	0,00	
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0,00	
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	69.192.883.867,00	46.013.833.729

	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	69.192.883.867,00	46.013.833.729
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	574.554.900,00	

	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1.148.300.000,00	175.000.000
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2900 Orang	5.675.120.000,00	5.675.120.000

	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50000 Orang	61.794.908.967,00	40.163.713.729
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	0,00	
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	-	-	18.732.000.000,00	10.577.350.000

						PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	18.732.000.000,00	10.577.350.000
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	17.532.000.000,00	10.513.600.000

	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2000 Orang	1.000.000.000,00	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	63.750.000
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	5.378.400.000,00	1.348.900.000
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	5.378.400.000,00	1.348.900.000

	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000,00	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	11500 Orang	5.173.400.000,00	790.000.000
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	400 Orang	200.000.000,00	527.500.000

						Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0,00	31.400.000
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	18.180.667.800,00	13.554.591.000
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	18.180.667.800,00	13.554.591.000

	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3500 Orang	700.000.000,00	2.004.901.000

	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1300 Orang	16.580.668.000,00	10.715.000.000
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	149.999.800,00	71.400.000

	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	750.000.000,00	763.290.000
	J U M L A H								119.425.945.467,00	79.826.173.142

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (absolut, konkuren dan pemerintahan umum). Perubahan tersebut antara lain adanya pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini juga dirasakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol), baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun kedudukannya sebagai perangkat daerah.

Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur/bupati/wali kota yang dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai oleh APBN. Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya dengan pembiayaan dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Permasalahan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah saat ini adalah:

1. Ketidakjelasan kedudukan dan status kelembagaan kesbangpol sebagai perangkat daerah mengingat sesuai

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada urusan kesbangpol dan masih berkembang wacana bahwa kesbangpol akan menjadi instansi vertikal;
2. Terdapat keraguan pemerintah daerah terhadap bentuk perangkat daerah kesbangpol pasca restrukturisasi perangkat daerah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yakni Badan sebagai pelaksana urusan fungsi penunjang;
 3. Tidak adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai tugas dan fungsi Badan Kesbangpol;
 4. Ketidaksesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan; dan
 5. Kesulitan dalam menyusun dokumen anggaran sehingga program strategis tidak terakomodir.

Menanggapi beberapa permasalahan tersebut di atas perlu adanya penguatan kelembagaan kesbangpol dengan perubahan status kelembagaan dari kantor menjadi badan. Alhamdulillah... dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah status kelembagaan Kesbang sudah menjadi Badan.

Tabel 2.5
Kerangka Keterkaitan Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya	Isu Strategis Badan Kesbang dan Politik
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.	Keamanan dan ketertiban didaerah	Penyelenggaraa n ketenteraman dan ketertiban umum serta Politik	Peningkatan pendidikan politik dan kenyamanan lingkungan untuk mengantisipasi potensi konflik poleksosbud

Agar upaya pencapaian tujuan dan misi tersebut di atas dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta lebih terfokus maka perlu ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya yang dirumuskan melalui metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi.

1. Analisis Lingkungan Internal

a) Kekuatan

a.1 Tersedianya job description yang jelas, berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a.2 Terbangunnya Koordinasi pelaksanaan tugas antar unit kerja sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.

a.3 Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, yang berisi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b) Kelemahan

b.1 Kondisi SDM yang kurang memadai, dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mengingat masih banyak personil yang kurang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan dari sisi kuantitas, belum seluruh formasi jabatan memiliki staf pendukung sebagaimana *Job Spesification* Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya yang ideal. Sehingga dalam menyelesaikan tugas

terkadang masih dibantu oleh bidang lain karena kurangnya personil terutama untuk tenaga fungsional.

b.2 Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b.3 Masih sangat minimnya kemampuan organisasi dalam program peningkatan kompetensi aparatur melalui penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional di dalam dan ke luar Daerah.

b.4 Masih terbatasnya data dan informasi, sistem dan implementasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang lengkap, akurat dan akuntabel.

2. Analisis Lingkungan Ekstrenal

a) Peluang

a.1 Otonomi Daerah yang diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dengan kewenangan yang bulat dan utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagai salah satu lembaga teknis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Pembangunan politik dalam negeri.

a.2 Potensi Daerah, jumlah penduduk yang cukup besar dan budaya masyarakat yang religius, merupakan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya untuk mengembangkan eksistensinya.

a.3 Keterbukaan kesempatan untuk peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional, baik yang diselenggarakan oleh institusi Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, Perguruan Tinggi (Negeri, Swasta) maupun Organisasi Non Pemerintah (LSM) terutama yang berkaitan erat dengan penunjang

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

a.4 Ketersedian konstitusi dan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

b) Ancaman/Tantangan

b.1 Masih lemahnya system koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi antara lembaga suprastruktur dan infra struktur politik di daerah.

b.2 Maraknya forum-forum diskusi Ipoleksosbud hankam sebagai bentuk manifestasi kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat yang dalam pelaksanaannya tidak jarang cenderung kebablasan dan mengabaikan etika dan moral kepatutan.

b.3 Masih sering terjadinya perselisihan (konflik) antar maupun inter lembaga partai politik, Ormas, Orsos, LSM dan lembaga non pemerintah lainnya, sebagai konsekuensi dari kurangnya pemahaman makna demokrasi dan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai nilai Pancasila dan UUD 1945.

b.3. Masih kurangnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, menurunnya rasa kebangsaan dan bela negara, serta dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan daerah.

b.4 Meningkatnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan merebaknya berbagai kerusuhan dan unjukrasa ketidak puasan masyarakat, tindak kriminal dan berbagai penyakit masyarakat.

b.5 Kepesatan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi di era globalisasi dengan berbagai ekses yang menyertainya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.6
Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Awal	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			119.425.945.467,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			79.826.173.142
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			119.325.945.467,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			79.826.173.142
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			119.325.945.467,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			79.826.173.142
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.591.993.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	5.151.498.413
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	133.350.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	106.950.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	26.400.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.020.252.170,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.246.243.233
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.020.252.170,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.246.243.233
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	146.600.050,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	46.600.050,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	422.447.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	373.533.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.174.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	106.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	76.140.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.500.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56.133.200,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	71.133.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	27.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	27.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	177.992.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	89.604.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	88.388.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	236.021.980,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	216.721.980
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.021.980,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.021.980
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	455.330.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	245.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	180.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15.330.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15.000.000
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	2.350.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	3.180.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	2.350.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	3.180.000.000

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2100 Orang	1.050.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2100 Orang	1.660.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2200 Orang	1.100.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2200 Orang	1.470.000.000

		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	100.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	50.000.000
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	0,00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0 Orang	0,00	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0 Orang	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0,00	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	

3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	69.192.883.867,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	46.013.833.729
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	69.192.883.867,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	46.013.833.729

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	574.554.900,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	2 Dokumen	1.148.300.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	175.000.000

		Politik di Daerah yang Disusun			n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2900 Orang	5.675.120.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2900 Orang	5.675.120.000

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50000 Orang	61.794.908.967,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50000 Orang	40.163.713.729
--	---	---	-------------	-------------------	---	---	-------------	----------------

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	0,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	18.732.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	10.577.350.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	18.732.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	-	-	10.577.350.000

					Organisasi Kemasyarakatan			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	17.532.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	10.513.600.000

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2000 Orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2000 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	63.750.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	5.378.400.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	1.348.900.000

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	5.378.400.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	1.348.900.000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	11500 Orang	5.173.400.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	11500 Orang	790.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	200.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	527.500.000

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	31.400.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	18.180.667.800,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	13.554.591.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	18.180.667.800,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	13.554.591.000

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	3500 Orang	700.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta	3500 Orang	2.004.901.000

		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1300 Orang	16.580.668.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1300 Orang	10.715.000.000

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	149.999.800,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	71.400.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	750.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	763.290.000
				119.425.945.467,00				79.826.173.142

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yakni merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum Perangkat Daerah Bakesbangpol. Forum Perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari Tahun 2024. Berdasarkan kegiatan tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh stakeholder yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan Bakesbangpol tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mengemban misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Professional. Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Potensi Dan Kejadian Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Tertangani. Dan guna mewujudkan IKU dimaksud, Bakesbangpol merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan di atas, Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 6 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1.	Meningkatkan kemampuan deteksi dini potensi konflik berlatar belakang ipoleksosbudhankam	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

		- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik melalui kegiatan pembinaan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3.	Meningkatkan cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Meningkatkan cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5.	Meningkatkan jumlah kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
----	---	---

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Selain itu harus menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur terkait sehingga pelaksanaan kegiatan akan mendorong sinergi antar unsur terkait.

Berdasarkan uraian di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tujuan berdasarkan Renstra yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatkan kondusifitas daerah dengan sasaran menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyataoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah kegiatan operasional.

Berdasarkan pengertian tersebut sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya adalah

- 1. Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya;
- 2. Predikat SAKIP Perangkat Daerah;
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
IKU Bakesbangpol Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	Target 2025
1	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	Jumlah potensi konflik terkait poleksosbud yang ditangani x 100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	3	Hasil evaluasi SAKIP	Predikat	Hasil evaluasi SAKIP dari inspektorat	BB
		4	Nilai IKM	%	Menunjukan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85

3.2 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Secara ringkas dari total sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdapat 14 sub kegiatan yang dihapus, yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
6. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
7. Pembentukan Paskibraka;
8. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
9. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
10. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
11. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
12. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

13. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
14. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3.3. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Kebijakan belanja pada perubahan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2025;
2. Kegiatan yang sudah ada (kegiatan lanjutan) maupun penghapusan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dan yang tidak terakomodir dalam APBD serta dengan mempertimbangkan rasionalisasi anggaran, dan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri dari 6 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 72,846,573,042,- sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun- g Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00						96.030.101.976,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00						96.030.101.976,00		
	8	0 1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00						96.030.101.976,00		
1	8	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.591.993.800,00	5.223.498.413,00	5.156.498.413,00						5.154.559.250,00		
	8	0 1	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	133.350.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	Inovasi Pelayana n Publik	-		133.350.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokume n	106.950.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Inovasi Pelayana n Publik			106.950.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	26.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Inovasi Pelayana n Publik			26.400.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.020.252.170,00	4.246.243.233,00	4.246.243.233,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-		4.020.252.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.020.252.170,00	4.246.243.233,00	4.246.243.233,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik			4.020.252.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	146.600.050,00	0,00	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	46.600.050,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					NON URUSAN							119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00						96.030.101.976,00		
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00						96.030.101.976,00		
2	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.591.993.800,00	5.223.498.413,00	5.156.498.413,00							5.154.559.250,00	
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	146.600.050,00	0,00	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00					96.030.101.976,00			
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00					96.030.101.976,00			
3	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.591.993.800,00	5.223.498.413,00	5.156.498.413,00					5.154.559.250,00		
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	422.447.600,00	445.533.200,00	445.533.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	439.022.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	87.174.400,00	106.900.000,00	126.900.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		87.174.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.140.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		76.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	56.133.200,00	71.133.200,00	71.133.200,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		56.133.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik		29.944.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																

							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik				26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.06	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	145.000.000,00	73.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik				163.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	177.992.000,00	0,00	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.07	00	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	89.604.000,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.07	00	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	88.388.000,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Inovasi Pelayanan Publik				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	236.021.980,00	216.721.980,00	216.721.980,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-			102.621.980,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.08	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.021.980,00	33.021.980,00	33.021.980,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik				33.021.980,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.08	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	203.000.000,00	183.700.000,00	183.700.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayana n Publik			69.600.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	455.330.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00			-	Inovasi Pelayana n Publik	-		459.313.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	250.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayana n Publik			323.035.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayana n Publik			121.278.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 1	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi				10 Unit	10 Unit	15.330.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Inovasi Pelayana n Publik			15.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
4	8	0 1	0 2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	2.350.000.000,00	3.400.000.000,00	3.065.000.000,00							2.250.000.000,00	

	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	-	2.350.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00			-	-	-		2.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2100 Orang	2100 Orang	1.050.000.000,00	1.850.000.000,00	1.545.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2200 Orang	2200 Orang	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	1.470.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	8	0	0	2.01	00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.01	00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.01	00	Pembentukan Paskibraka																		
							Jumlah Paskibraka				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.01	00	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	69.192.883.867,00	7.625.120.000,00	46.395.421.229,00								45.880.142.726,00	

	8	013	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	-	69.192.883.867,00	7.625.120.000,00	7.625.120.000,00			-	-	-		45.880.142.726,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	013	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokume n	574.554.900,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	013	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	

							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.148.300.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.148.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2900 Orang	2900 Orang	5.675.120.000,00	5.675.120.000,00	5.675.120.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	-			5.068.129.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50000 Orang	50000 Orang	61.794.908.967,00	1.775.000.000,00	40.545.301.229,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-			39.663.713.726,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	18.732.000.000,00	13.209.500.000,00	5.101.162.400,00							17.732.000.000,00	

	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	-	18.732.000.000,00	13.209.500.000,00	13.209.500.000,00			-	-	-		17.732.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3000 Orang	3000 Orang	17.532.000.000,00	13.142.000.000,00	4.469.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.532.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2000 Orang	2000 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	8	0	0	2.01	00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	67.500.000,00	632.162.400,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	8	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	5.378.400.000,00	1.471.900.000,00	1.623.900.000,00							5.913.400.000,00		
	8	0	0	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	-	5.378.400.000,00	1.471.900.000,00	1.471.900.000,00			-	-	-		5.913.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	2.01	00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.01	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				11500 Orang	11500 Orang	5.173.400.000,00	900.000.000,00	790.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.713.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	400 Orang	200.000.000,00	537.500.000,00	802.500.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	34.400.000,00	31.400.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	18.180.667.800,00	9.240.900.000,00	11.504.591.000,00							19.100.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	-	18.180.667.800,00	9.240.900.000,00	9.240.900.000,00			-	-	-		19.100.000.000,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					0 Dokumen	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3500 Orang	3500 Orang	700.000.000,00	1.300.000.000,00	2.004.901.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1300 Orang	1300 Orang	16.580.668.000,00	7.065.000.000,00	8.665.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	149.999.800,00	71.400.000,00	71.400.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	804.500.000,00	763.290.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H											119.425.945.467,00	40.170.918.413,00	72.846.573.042,00						96.030.101.976,00				

BAB IV

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu tahun anggaran sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian integral dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian keberadaan Renja SKPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra merupakan pedoman penting dan mendasar bagi SKPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan.

Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diaplikasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

Tasikmalaya, 23 Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya


ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660929 198710 1 002